

Keluarga SYL Bakal Dipanggil Untuk Bersaksi di Persidangan

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan memanggil keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk bersaksi di persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak menyatakan, keluarga SYL akan dihadirkan setelah selesai meminta keterangan dari internal Kementan.

"Kita rampungkan dulu internal (Kementan) semuanya perkara pokok dalam dakwaan, nanti Keluarga kita panggil semua," kata Meyer saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/4) malam.

Keluarga SYL yang akan dipanggil untuk hadir di ruang sidang yang sudah di BAP.

"Yang disebut sebut itu, Kemal Rendindo, Tita, Bu Ayu (istri SYL) inibisa kita panggil, karena BAP-nya ada," ujarnya.

Pihak keluarga memang berhak menolak bersaksi untuk SYL. Namun, tidak untuk terdakwa lainnya, yakni terdakwa Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo serta Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhamad Hatta.

"Setidaknya kita periksa di dua perkara ini, itu mere-

ka harus bersaksi, tidak bisa mengundurkan diri di situ," ucapnya.

Kendati demikian, Meyer belum bisa memastikan kapan keluarga SYL akan dipanggil untuk bersaksi.

Uang Bulanan Istri SYL

Mantan Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian (Kementan) Isnar Widodo, saat bersaksi di persidangan mengungkapkan bahwa pihak Kementan kerap mengeluarkan uang bulanan untuk Ayu Sri Harahap, istri SYL.

"Kadang-kadang uang harian, uang bulanan, Yang Mulia," kata Isnar menjawab hakim.

Isnar mengaku bahwa uang tersebut diminta oleh mantan ajudan SYL bernama Panji Hartanto.

"Uang bulannya (untuk) siapa?" tanya Hakim memastikan.

"Uang bulanan untuk Bu Menteri," kata Isnar.

"Berapa Saudara siapkan per bulannya?" tanya Hakim lagi.

"Rp 25 juta sampai Rp 30 juta, Pak," ungkap Isnar.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. ● han

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jalani Sidang Etik Awal Mei 2024

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Lembaga Antiruasah, Nurul Ghufron.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebutkan, sidang etik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Ghufron itu bakal digelar Kamis (2/5).

"Sidangnya mulai tanggal 2 Mei," kata Albertina kepada wartawan, Rabu (24/4).

Dalam kasus itu, turut dilaporan Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata. Namun, Albertina menyebutkan hanya Ghufron yang lanjut ke tahap sidang.

"Yang disidangkan Pak

NG," ujarnya.

Belum diketahui apakah laporan terhadap Alex itu tidak terbukti atau akan disidangkan di waktu yang berbeda dengan Ghufron. Sementara Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris secara terpisah menyebutkan, laporan terhadap Ghufron terkait penyalahgunaan pengaruh yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Saat ini Pak NG sendiri memiliki kasus etik yang sedang ditangani oleh Dewas terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh sebagai insan KPK dalam mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM," kata Haris kepada wartawan, Rabu (24/4). ● mei

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Korupsi Timah

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Koordinasi dilakukan untuk menelusuri aliran dana para tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi Harvey Moeis.

"Kejaksanaan koordinasi terus dengan kami sejak awal," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Namun, Ivan enggan membeberkan hasil penelusuran PPATK yang dikordinasikan dengan Kejagung. "Konfirmasi langsung ke Kejaksanaan ya. Semua kami serahkan ke teman-teman JPU (jaksa penuntut umum)," katanya.

Dalam kasus ini, Ke-

jagung telah menetapkan 16 tersangka di antaranya Harvey, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

Kejagung mencarakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para tersangka. Sejumlah aset juga telah disita dari para tersangka di antaranya empat mobil mewah dari Harvey Moeis hingga 238.848 meter persegi lahan smelter dari sejumlah perusahaan.

Para tersangka diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini masih dihitung. Namun, berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH 2024

Mendagri Tito Karnavian (kiri) memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution (kedua kiri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Balai Kota Surabaya, Jatim, Kamis (25/4). Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tersebut mengangkat tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau Dan Lingkungan Yang Sehat.

DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dilakukan pada Awal Periode 2024-2029

Banyak partai politik gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas 4 persen. Setinggi apa pun suara caleg tak dapat dikonversi jadi kursi di DPR.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029.

"Awal periode itu adalah saat yang tepat untuk memperbaiki sistem pemilu, yang jauh dari pelaksanaan pemilu-nya," ujar Doli kepada wartawan pada Kamis (25/4).

"Supaya kita betul-betul objektif dan punya cukup waktu untuk mengelaborasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder bangsa dan negara," ujar Doli menambahkan.

Doli mengatakan, sudah banyak catatan pada Pemilu 2024 yang disuarakan banyak kalangan betapa pentingnya penyempurnaan sistem pe-

milu, politik, dan pemerintahan. Misalnya, ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pembentuk undang-undang agar merevisi ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang saat ini besarnya 4 persen.

MK meminta agar besaran itu dievaluasi dengan rasional dan memperhatikan pendapat para pakar agar ditemukan angka yang secara ilmiah lebih tepat. Sebab besaran itu dinilai tidak selaras dengan sistem pemilu proporsional lantaran banyaknya suara rakyat yang terbuang.

Banyak partai politik yang gagal memenuhi ambang batas 4 persen tersebut, sehingga setinggi apa pun suara caleg mereka tidak dapat

dikonversi menjadi kursi di DPR.

Doli juga menyinggung pidato Prabowo Subianto yang pada intinya mempersoalkan sistem politik yang "berisik dan melelahkan" serta pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia.

Doli menyinggung, sedikitnya ada 8 isu prioritas revisi UU Pemilu ini. Lima di antaranya merupakan persoalan klasik, yakni evaluasi sistem pemilu legislatif proposional terbuka, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, penataan ulang distribusi dan besaran daerah pemilihan (dapil, district magnitude), dan sistem konversi suara ke kursi dewan.

Sisanya, menurut Doli, adalah isu-isu kontemporer. Pertama, evaluasi sejauh mana keserentakan pemilu berhasil menciptakan efektivitas dan efisiensi. Kedua, kajian terkait peran teknologi dalam

pemilu, termasuk di antaranya evaluasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan infrastruktur penunjang digitalisasi pemilu.

Ketiga, pengaturan yang lebih ketat soal mahar politik dan politik uang beserta

mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukumnya. Keempat, penyempurnaan rezim pemilu yang saat ini terdapat banyak ketidakseragaman pengaturan antara rezim pemilu nasional dengan rezim pilkada. ● han

Istana: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo-Gibran Atas Inisiatif Prabowo

JAKARTA (IM) - Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka, Rabu (24/4), atas inisiatif Prabowo.

"Memang betul Presiden Jokowi menerima Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, pada tanggal 24 April 2024 di Istana Merdeka. Pertemuan itu atas inisiatif dan permohonan Bapak Prabowo dan Pak Gibran," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (25/4).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo-Gibran menyampaikan secara langsung terkait penetapan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4) pagi, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres. Kepala Negara mengucapkan selamat kepada Prabowo - Gibran.

"Presiden mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan Oktober 2024, berjalan dengan baik dan

lancar," ucap Ari. Jokowi berharap pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif dan langkah-langkah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju.

"Saat ini, persatuan nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi-politik global yang telah berkejolak," kata Ari.

Sebelumnya diberitakan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana.

Mobil Alphard putih berpelat nomor B108 PSD yang ditumpangi Prabowo-Gibran terpanjat masuk Istana Merdeka sekitar pukul 19.30 WIB. Keduanya melakukan pertemuan selama sekitar 2 jam lebih.

Mobil Alphard putih yang ditumpangi Prabowo lterlihat meninggalkan Istana Merdeka dari pintu Bali yang berada di samping Masjid Baiturrahman pada pukul 21.42 WIB. ● han



MENU MAKANAN JAMAAH CALON HAJI DI PESAWAT

Gubernur Kepri Ansar Ahmad (tengah) melihat contoh paket makanan untuk jamaah calon haji selama dalam penerbangan di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH) Batam, Kepri, Kamis (25/4). Tes makanan tersebut untuk memastikan standarisasi makanan yang disajikan kepada calon jamaah haji selama dalam penerbangan.

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tidak Ada Parpol Oposisi

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tidak akan terwujud jika tidak ada partai politik yang mengambil peran sebagai oposisi.

"Saya baru bisa optimis kalau partai-partai yang 'kalah' koalisinya dalam pilpres kali ini tetap duduk sebagai penyeimbang atau boleh kita sebut secara longgar oposisi," kata Bivitri kepada wartawan, Kamis (25/4).

Partai-partai politik yang duduk sebagai oposisi itu nantinya diharapkan dapat mendorong pem-

bentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan demi merombak sistem yang disalahkan.

Sementara, apabila seluruh partai politik merapat ke pemerintah dan menjadi koalisi besar, undang-undang itu akan sulit terwujud karena tidak ada kepentingan untuk melakukan perubahan.

"Karena memang situasi seperti ini menguntungkan, menyenangkan untuk mereka, mereka bisa abuse lagi nanti, mereka presidennya bisa tanpa kontrol," kata Bivitri.

Ia menegaskan, siapapun presidennya, UU Lembaga

Kepresidenan tetap harus dibentuk demi membatasi kekuasaan seorang presiden agar tidak absolut.

"Termasuk untuk menjaga dari situasi di mana dia sendiri sudah melemahkan lembaga-lembaga lainnya seperti yang sekarang telah dilakukan," ujar Bivitri.

Menurut Bivitri, di atas kertas, presiden adalah lembaga yang punya kekuasaan hampir absolut karena menyalakan mekanisme *check and balances* oleh parlemen.

Namun, apabila parlemen sebagai kekuatan penyeimbang dilemahkan seperti yang terjadi di era Presiden Joko Widodo, maka

mekanisme *check and balances* itu pun tidak berjalan.

"Jadi akhirnya yang terjadi ya absolute power, itu yang harus dibatasi melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan," katanya.

Wacana membuat UU Lembaga Kepresidenan mengemuka kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hakim MK Arief Hidayat yang menyatakan pendapat *opinion* atau pendapat berbeda menilai perlu ada undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. ● han

LELANG OTOMOTIF			
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Sabtu - Minggu, 04 - 05 Mei 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Senin, 06 Mei 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 14 - 15 Mei 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 16 Mei 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Sabtu - Minggu, 25 - 26 Mei 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Senin, 27 Mei 2024	11.00 WIB s/d Selesai

JADWAL LELANG BULAN JUNI 2024			
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Sabtu - Minggu, 01 - 02 Juni 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Senin, 03 Juni 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 11 - 12 Juni 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 13 Juni 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Sabtu - Minggu, 22 - 23 Juni 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Senin, 24 Juni 2024	11.00 WIB s/d Selesai

JADWAL LELANG BULAN JULI 2024			
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Selasa - Rabu, 02 - 03 Juli 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 04 Juli 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 09 - 10 Juli 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 11 Juli 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 16 - 17 Juli 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 18 Juli 2024	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 23 - 24 Juli 2024	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 25 Juli 2024	11.00 WIB s/d Selesai

LOKASI OPEN HOUSE & LELANG	
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.08, Petungkana Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan	

SYARAT & KETENTUAN LELANG :	
1. Pemastian LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar :	- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NIPIL MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NIPIL MOTOR
2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ("as is")	
3. Uang Jaminan dan Pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 5710999971 di BCA cab. Kyal Caringin, Jakarta Pusat.	
4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan WANGPRESTASI dan UANG JAMINAN AKAN HANGUS.	
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras.	Telp : (021) 21263003 / 081399865669 Email : powerteam@power-auction.id

Jakarta, 26 April 2024
PANITIA LELANG

TERBUKA UNTUK UMUM